

EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 AMPIBABO KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Rifka S Akibu

rahayu_adinda@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The objective of this research to figure out result of evaluation of school based curriculum policy in SMA Negeri 1 Ampibabo examined based on William Dunn theory using variables such as 1) effectiveness, 2) efficiency, (3) adequateness, 4) equality, 5) responsiveness and 6) accuracy. This was a qualitative research with 5 informants. The research result showed that the implantation of school based curriculum in SMA Negeri 1 Ampibabo have not been optimal due to the lack of facilities supporting in the school as the complementary of school Based Curriculum in SMA Negeri 1 Ampibabo. The researcher also suggested that the teachers need to understand comprehensively the implementation of school Based Curriculum either in concept, arrangement or the practice in the field.

Keywords: *Evaluation, Policy and School Based Curriculum.*

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum.

KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Muslich, 2007).

Dengan adanya landasan penyusunan KTSP berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri pendidikan nasional menjadi landasan yang sangat kuat dalam mengelola Penyusunan ktsp dilakukan oleh satuan pendidikan dengan

memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh badan standar nasional pendidikan (BSNP) Wina Sanjaya (2008: 130). Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif (Mulyasa, 2008: 9).

Ada dua hal pokok yang perlu disiapkan oleh pihak sekolah, yaitu kesiapan materil (sumber daya alamiah sekolah) dan non materil (sumber daya manusia sekolah). Bentuk kesiapan materil sekolah dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial. Sedangkan bentuk kesiapan non materil sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua (Susilo, 2008: 180-191).

Fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2011: 463) memiliki

empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realita pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap:

- 1) Pencapaian target (*output*)
- 2) Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*)
- 3) Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian
- 4) Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama di tempat lain yang berhasil.
- 5) Identifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003: 93) ada tiga hal pokok, yaitu: (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan

dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008: 227), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. *Tugas pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan *tugas kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya. Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain. *Tugas kedua* dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal. Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal

dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
- 3) Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

- 1) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
- 2) Untuk mengsosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

Fokus permasalahan terkait dengan evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berjalan kurang optimal meski telah ada landasan untuk penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan publik. William N. Dunn (2003: 609) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

- 1) Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai

hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

- 2) Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- 3) Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- 4) Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber masyarakat.
- 5) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya –

efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

- 6) Ketepatan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Kebijakan yang menjadi faktor penelitian ini adalah menilai bagaimana implementasi

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di Sekolah SMA Negeri 1 Ampibabo, model evaluasi kebijakan William N Dunn dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan lebih menekankan pada aspek proses untuk mencapai tujuan, efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap dalam mencapai tujuan penggunaan sumber daya secara optimal, dampak yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dan manfaat kebijakan itu bagi kelompok sasaran.

Kriteria yang digunakan untuk mengkaji evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, digambarkan sebagaimana pada table berikut:

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press Hal. 610

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara *purposive* dan jumlah informan terpilih sebanyak lima (5) orang. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Ampibabo. Proses pengambilan dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih serta dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka data diperoleh dari dua sumber, yakni (a) data primer berasal

dari hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada enam variabel model evaluasi kebijakan William N Dunn dan hasil observasi, (b) data sekunder berasal dari Tata usaha SMA Negeri 1 Ampibabo atau lembaga/instansi lain yang terkait terutama yang menyangkut tentang dokumen, peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Analisis

data dilakukan melalui tahapan penyusunan satuan atau editing data, kategorisasi atau pengelompokan data, interpretasi atau penafsiran makna data, dan penarikan kesimpulan sertasaran-saran hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas

Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran, berarti mungkin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektifitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan kebijakan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan yang dimaksud yaitu pencapaian hasil dari penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dilihat dari ketepatan waktu kesesuaian hasil dengan tujuan yang diinginkan.

Dari pendapat informan di atas membuktikan bahwa implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Ampibabo sudah tidak efektif lagi dan sudah saatnya untuk mengganti dengan kurikulum baru.

Peneliti berpendapat agar kinerja kebijakan dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan Kurikulum :

1. penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.
2. Perlunya pemahaman KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.

Efisiensi

Menurut William N Dunn (2003: 430), yang menyatakan bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan

sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan hasil penelitian di atas ternyata belum efektif, karena kurang didukung dengan ketersediaan sumber daya dan yang memadai. Peneliti berpendapat bahwa untuk melaksanakan kegiatan apapun agar tercapai hasil yang diharapkan maka harus didukung dana yang memadai. Demikian pula halnya dalam penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini. Karena dana merupakan salah satu sumber daya yang harus ada dalam penerapan manajemen. Tanpa ada dukungan dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan optimal.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dari hasil penelitian terbukti bahwa keberadaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang signifikan terutama dalam proses pembelajaran dan juga dukungan dari pemerintah yang harus siap dalam memberikan kebutuhan seperti buku

pelajaran yang bisa dipakai oleh setiap siswa dalam proses pembelajaran.

Peneliti berpendapat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut bisa memberikan manfaat atau pengaruh bagi kelompok sasaran maka hendaknya pihak terkait baik pemerintah daerah (eksekutif), maupun pihak lain yang terkait perlu melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut.

Perataan

Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. William N. Dunn menyatakan bahwa kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terbukti bahwa penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah dilaksanakan secara tegas dan merata namun masih ada kendala di kesiapan sekolah untuk menyediakan sarana penunjang bagi siswa. Selama ini penerapan kebijakan terutama menyangkut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri.

Untuk itu, peneliti berpendapat bahwa tidak tegas dan meratanya penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan membuat pelaksanaan kurikulum tidak bisa berjalan efektif. Karena kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan alternatif dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan alternatif atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437).

Pendapat di atas membuktikan bahwa implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan mendapat respon yang sangat baik dari pihak sekolah dan dukungan positif dari semua pihak termasuk yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Untuk itu, peneliti berpendapat bahwa respon dari setiap yang terlibat dalam proses pembelajaran sudah bagus hanya saja ada beberapa hal yang harus di lengkapi oleh para pembuat kebijakan yaitu memperhatikan setiap kelebihan dan kekurangan dari Kebijakan yang dikeluarkan.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas alternative, karena alternatif ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau alternatif untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun dimungkinkan

alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 1 Ampibabo belum sepenuhnya berjalan dengan optimal hal ini di tunjukkan dengan evaluasi kebijakan menurut William Dunn dengan menggunakan 6 indikator yaitu, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), belum tercapai di lihat dari indikator efektifitas dan efisiensi, karena kesiapan sumber daya di setiap satuan pendidikan belum merata dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum fokus pada kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum dijalankan dengan baik karena dalam melaksanakan suatu kebijakan di butuhkan dana yang besar. Di lihat dari indikator kecukupan dan perataan dari implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan . ketepatan dalam penerapan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) sudah dilakukan dengan merata dan tepat sasaran untuk guru dan siswa. Responsivitas dari penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) mendapat respon yang positif dari guru dan siswa.

Rekomendasi

Bahwa perlunya pemahaman secara komprehensif terhadap guru baik konsep, penyusunan kurikulum maupun prakteknya dilapangan dan di perlukan dukungan dari pemerintah untuk melengkapi sarana dan

prasarana, sumber daya manusia yang ada di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Hasan Muhammad, M.Si selaku ketua pembimbing dan Dr. H Sastrio Mansyur M,Si selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.
- Dunn. N, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Disempurnakan: Pengembangan Standar Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Muhlich, Mansyur. 2007. *KTSP pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Konseptual (panduan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sosilo, Muhammad Joko 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan